

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang masih belum dapat menanggulangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu masalah serius dalam pembangunan di Indonesia. Kemiskinan telah membuat masyarakat kesulitan dalam menjalani kehidupannya. Kemiskinan merupakan suatu kondisi yang ditolak oleh masyarakat, tetapi pada kenyataannya sangat sulit untuk dihindarkan.

Salah satu tugas pokok pemerintah daerah adalah pemberdayaan masyarakat. Dengan demikian, pemerintah daerah senantiasa dituntut mengambil peran yang besar dalam memberdayakan masyarakat yang ada di wilayahnya. Pentingnya pemberdayaan masyarakat didasarkan pada pemikiran pengelolaan sumber daya lokal, yang merupakan sosok manajemen pembangunan untuk mencoba menjawab tantangan pembangunan, yaitu kemiskinan. Pemikiran tersebut merupakan mekanisme perencanaan pembangunan yang berorientasi pada manusia, yang menekankan pada teknologi pembelajaran sosial dan strategi perumusan program yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan masyarakat untuk mengaktualisasikan diri mereka. Tujuannya adalah sebagai upaya pemerintah dalam memajukan kesejahteraan masyarakat melalui kebijakan mengentaskan kemiskinan dan keterbelakangan masyarakat.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pemerintah daerah diberikan otonomi yang luas untuk mengurus dan

mengatur berbagai kepentingan daerah. Proses desentralisasi ini menjadikan pemerintah daerah sadar tentang pentingnya kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi lokal. Pemerintah daerah memiliki wewenang dan tanggung jawab penuh dalam mengelola potensi sumber daya daerah secara optimal, sehingga mampu menggerakkan pembangunan daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal. Oleh sebab itu, pemerintah daerah memiliki kewajiban dalam menanggulangi kemiskinan dan memakmurkan masyarakatnya.

Berdasarkan data menurut BPS, jumlah penduduk miskin Kabupaten Tegal pada tahun 2017 mencapai 9,90% dengan garis kemiskinan sekitar Rp319.758,- per kapita per bulan¹. Angka tersebut tergolong masih cukup tinggi. Kemiskinan ini membuat masyarakat tidak berdaya di berbagai bidang dan mengakibatkan masyarakat mengalami hambatan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Pemerintahan Kabupaten Tegal mengadakan salah satu program pemberdayaan masyarakat yaitu desa wisata. Desa wisata ini merupakan salah satu alternatif tempat wisata yang dapat dituju oleh masyarakat. Desa wisata sendiri juga sudah mulai digemari oleh para wisatawan. Mereka mulai menggemari tempat wisata yang tidak hanya menyajikan keindahan alamnya saja, tetapi juga terdapat interaksi dengan masyarakat sekitar. Program ini dilakukan dengan memanfaatkan potensi sumber daya lokal berdasarkan kekhasan budaya dan alam serta kebutuhan manusia dalam berwisata. Program desa wisata ini diyakini dapat meningkatkan

¹ BPS Kabupaten Tegal. 2018. Statistik Daerah Kabupaten Tegal 2018. Tegal: BPS Kabupaten Tegal.

kemandirian dan kesejahteraan masyarakat, penurunan angka kemiskinan dan pengangguran, serta pelestarian lingkungan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata, desa wisata merupakan suatu daerah tujuan wisata atau disebut pula destinasi pariwisata yang mengintegrasikan daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas wisata, aksesibilitas, yang disajikan dalam suatu struktur kehidupan masyarakat yang menyatu dengan tata cara dan tradisi yang berlaku. Secara garis besar, desa wisata adalah suatu wilayah pedesaan yang dapat dimanfaatkan kemampuan unsur-unsur yang memiliki atribut produk wisata secara terpadu, dimana desa tersebut menawarkan secara keseluruhan suasana yang memiliki tema dengan mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari tatanan segi kehidupan sosial, budaya, ekonomi, dan adat keseharian yang memiliki aktifitas pariwisata.

Desa wisata pada dasarnya menonjolkan kearifan lokal dan budaya setempat. Di samping itu pengelolaannya langsung dari masyarakat setempat dengan memanfaatkan potensi alam, sosial, ekonomi, budaya, sejarah, maupun tata ruang yang ada. Pembentukan desa wisata biasanya dikarenakan desa tersebut mempunyai ciri khas, daya tarik yang mampu dikomersilkan. Daya tarik wisata merupakan segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan, dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya, dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan. Dengan berbagai daya tarik yang dimiliki oleh suatu daerah, maka secara tidak langsung pengembangan desa wisata ini sekaligus sebagai wadah untuk melestarikan seni dan budaya yang ada dalam masyarakat yang edukatif dan kreatif.

Menurut Priasukmana dan Mulyadin², pembentukkan desa wisata bertujuan untuk:

- a. Mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pembangunan pariwisata dengan menyediakan objek wisata yang alternatif.
- b. Menggali potensi desa untuk pembangunan masyarakat sekitar.
- c. Memperluas lapangan kerja dan lapangan usaha bagi penduduk desa, sehingga bisa meninggikan kesejahteraan kualitas hidup masyarakat desa. Dengan demikian akan terjadi pemerataan pembangunan ekonomi desa.
- d. Mendorong masyarakat kota yang relatif memiliki tingkat perekonomian mapan agar dapat berkunjung ke desa untuk berpariwisata (ruralisasi).
- e. Menumbuhkan rasa bangga bagi masyarakat desa untuk tetap tinggal di desanya serta mengurangi tingkat urbanisasi.
- f. Mempercepat pembaruan antara orang-orang non-pribumi dengan orang pribumi.
- g. Memperkokoh persatuan bangsa sehingga bisa mengatasi disintegrasi.

Salah satu desa wisata yang berada di Kabupaten Tegal adalah Desa Cempaka yang berada di Kecamatan Bumijawa. Desa Cempaka menawarkan keindahan alam pegunungan serta nuansa pedesaan yang khas dan asli kepada wisatawan. Sejak diresmikan pada tahun 2017 lalu, Desa Cempaka mulai mengalami perkembangan pesat. Lokasi yang awalnya hanya tempat biasa, sekarang menjadi magnet untuk wisatawan. Pemerintah desa dan kelompok sadar wisata (pokdarwis) desa setempat

² Priasukmana, Soetarso dan R. Mohamad Mulyadin. 2001. Pembangunan Desa Wisaa: Pelaksanaan Undang-Undang Otonomi Daerah. Info Sosial. Vol 2 No 1. 2001. pp 37-44

mampu mengubah potensi alam yang ada menjadi destinasi wisata. Salah satu objek wisata yang sudah terkenal adalah Tuk Mudal dan Pasar Slumpring. Pasar Slumpring sebelum dikembangkan menjadi objek wisata, dulunya hanyalah area kebun bambu yang lebat, namun saat ini menjadi pasar dengan konsep wisata kuliner tempo dulu dengan pembayaran menggunakan koin bambu. Para pedagangnya adalah masyarakat setempat yang menjual makanan dan minuman dari kreasi masyarakat lokal.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka dalam penelitian ini, peneliti akan mengulas lebih mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat melalui program Pemerintah Kabupaten Tegal dalam meningkatkan kualitas warga miskin. Judul penelitian yang diangkat oleh peneliti adalah **“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Program Desa Wisata Dalam Menanggulangi Kemiskinan”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah penelitian, yaitu:

1. Bagaimana proses pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Cempaka Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal?
2. Apakah faktor pendukung dan penghambat pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata dalam menanggulangi kemiskinan di Desa Cempaka Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mendeskripsikan proses pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata di Desa Cempaka Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.
2. Untuk mengetahui apa saja faktor yang mendukung dan menghambat pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata di Desa Cempaka Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.

Hasil penelitian ini diharapkan akan dapat menciptakan dua manfaat, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Sebagai sumbangan bagi ilmu pengetahuan terutama yang berhubungan dengan penanggulangan kemiskinan melalui pemberdayaan masyarakat dengan program inovasi pemerintah.

Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan referensi untuk melakukan penelitian selanjutnya, terutama yang berkaitan dengan pemberdayaan masyarakat dalam upaya penanggulang kemiskinan.

2. Manfaat Praktis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi pemerintah Kabupaten Tegal dalam penerapan dan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat dalam program penanggulangan kemiskinan.

Sebagai input atau bahan masukan untuk perbaikan di dalam pelaksanaan program desa wisata.

1.4 Landasan Teori

1.4.1 Desa Wisata

Desa Wisata menurut Ika Putra³ adalah suatu bentuk lingkungan pemukiman dengan tuntunan wisatawan dalam menikmati atau mengenal dan menghayati atau mempelajari kekhasan desa dengan segala daya tariknya dan dengan tuntunan kegiatan masyarakatnya (kegiatan hunian, interaksi sosial, kegiatan adat setempat dan sebagainya). Sehingga diharapkan terwujud suatu lingkungan yang harmonis yaitu rekreatif dan terpadu dengan lingkungannya.

Menurut Totok Mardikanto, dkk.⁴, menyatakan bahwa desa wisata adalah suatu kawasan pedesaan yang memancarkan keseluruhan suasana yang mencerminkan keaslian pedesaan, baik dari kehidupan sosial ekonomi, sosial budaya, adat istiadat, keseharian, memiliki arsitektur bangunan dan struktur tata ruang desa yang khas, atau kegiatan perekonomian yang unik dan menarik serta mempunyai potensi untuk dikembangkan pada berbagai komponen kepariwisataan. Tujuan program desa wisata adalah menggali potensi desa, memperluas lapangan kerja, ruralisasi, menumbuhkan rasa bangga masyarakat terhadap desanya, dan memperkuat persatuan bangsa. Strategi dalam program desa wisata adalah:

- a. Mengintegrasikan potensi dan atraksi wisata di desa wisata

³ Sari, Ratna Titi. 2010. Jalan-Jalan Yuk! Jogja&Solo. Yogyakarta: Atma Media

⁴ Mardikanto, Totok, dkk. 2014. Buku Pedoman Rintisan Model Desa Berdikari Provinsi Jawa Tengah Tahun 2015. Semarang: Pemerintah Provinsi Jawa Tengah 2014.

- b. Meningkatkan manajemen pengelolaan atraksi wisata/budaya peninggalan sejarah di lingkup desa wisata dan keterpaduan pengembangan dengan potensi pendukung budaya pedesaan.
- c. Memperkenalkan desa dengan keunikan produk-produk seni dan budayanya.
- d. Menggambarkan sadar wisata untuk mendorong tanggung jawab dan peran serta masyarakat dan industri dalam usaha pariwisata.

1.4.2 Pemberdayaan Masyarakat

Secara konseptual, pemberdayaan masyarakat (*empowerment*) berasal dari kata *power* yang berarti kekuasaan atau keberdayaan. Konsep pemberdayaan berawal dari penguatan modal sosial di masyarakat yang meliputi kepercayaan (*trust*), patuh aturan (*role*), dan jaringan (*networking*). Dengan memiliki modal sosial yang kuat maka kita akan dapat menguatkan *knowledge*, *money*, dan *people*. Konsep ini mengandung arti bahwa konsep pemberdayaan masyarakat adalah transfer kekuasaan melalui penguatan modal sosial kelompok untuk menjadikan kelompok produktif untuk mencapai kesejahteraan sosial. Modal sosial yang kuat akan menjamin *sustainable* di dalam membangun rasa kepercayaan di dalam masyarakat khususnya anggota kelompok (*how to build their trust*).

Pemberdayaan menurut Suhendra adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan, dinamis, secara sinergis mendorong keterlibatan semua potensi yang ada secara evolutif dengan keterlibatan potensi.⁵Di dalam buku Suhendra,

⁵ Suhendra. 2006. Peranan Birokrasi dalam Pemberdayaan Masyarakat. Bandung. Alfabeta.

pemberdayaan dijelaskan pula oleh Ife yaitu meningkatkan kekuasaan atas mereka yang kurang beruntung (*empowerment aims to increase the power of disadvantage*).

Menurut Widjaja, pemberdayaan masyarakat adalah upaya meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik di bidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya.⁶

Prijono dan Pranarka⁷ dalam buku Awang menyebutkan pemberdayaan sebagai proses belajar mengajar yang merupakan usaha terencana dan sistematis yang dilaksanakan secara berkesinambungan baik bagi individu maupun kolektif, guna mengembangkan daya (potensi), dan kemampuan yang terdapat dalam diri individu dan kelompok.

Pemberdayaan masyarakat merupakan aspek pembangunan. Hakikat pembangunan menurut Onny⁸ adalah pembangunan manusia seutuhnya dan masyarakat seutuhnya, dengan kata lain memberdayakan masyarakat mengandung makna mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.

⁶ Widjaja, HAW. 2003. Otonomi Desa Merupakan Otonomi Asli Bulat dan Utuh. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

⁷ Awang, Azam. 2010. Implementasi Pemberdayaan Pemerintahan Desa. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁸ Prijono, Onny S. dan A.M.W. Pranarka. 1996. Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasinya. Jakarta: CSIS

Pada pemberdayaan, pendekatan proses lebih memungkinkan pelaksanaan pembangunan yang memanusiakan manusia. Dalam pandangan ini keterlibatan masyarakat dalam pembangunan lebih mengarah kepada bentuk partisipasi, bukan dalam bentuk mobilisasi. Partisipasi masyarakat dalam perumusan program membuat masyarakat tidak semata-mata berkedudukan sebagai konsumen program, tetapi juga sebagai produsen karena telah ikut serta terlibat dalam proses pembuatan dan perumusannya, sehingga masyarakat merasa ikut memiliki program tersebut dan mempunyai tanggung jawab bagi keberhasilannya serta memiliki motivasi yang lebih bagi partisipasi pada tahap-tahap berikutnya.⁹

Kartasmita mengemukakan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara¹⁰, yakni:

- a. Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Kondisi ini berdasarkan asumsi bahwa setiap individu dan masyarakat memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Hakikat dari kemandirian dan keberdayaan rakyat adalah keyakinan dan potensi kemandirian tiap individu perlu untuk diberdayakan. Proses pemberdayaan masyarakat berakar kuat pada proses kemandirian tiap individu, yang kemungkinan meluas ke keluarga, serta kelompok masyarakat baik di tingkat lokal maupun nasional.

⁹ Soetomo. 2006. Strategi-Strategi Pembangunan Masyarakat. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Pelajar.

¹⁰ Kartasmita, Ginjar. 1995. Pemberdayaan Masyarakat Sebuah Tinjauan Administrasi Pidato Pengakuan Jabatan Guru Besar dalam Ilmu Administrasi pada Fakultas Ilmu Administrasi. Malang: Universitas Brawijaya.

- b. Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan prasarana dan sasaran yang baik fisik (irigrasi, jalan, dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses oleh masyarakat lapisan paling bawah. Terbentuknya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga-lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran. Dalam upaya pemberdayaan masyarakat ini yang paling penting antara lain adalah peningkatan mutu dan perbaikan sarana pendidikan dan kesehatan, serta akses pada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar.
- c. Memberdayakan masyarakat dalam arti melindungi dan membela kepentingan masyarakat yang lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau mungkin terpinggirkan dalam menghadapi yang kuat oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam konsep pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Menurut Sumaryadi, pemberdayaan masyarakat adalah upaya mempersiapkan masyarakat seiring dengan langkah upaya memperkuat kelembagaan masyarakat agar mereka mampu mewujudkan kemajuan, kemandirian, dan kesejahteraan dalam suasana keadilan sosial yang

berkelanjutan.¹¹ Selain itu pemberdayaan masyarakat menurut Sumaryadi pada dasarnya sebagai berikut:

- a. Membantu pengembangan manusiawi yang autentik dan integral dari masyarakat lemah, rentan, miskin perkantoran, masyarakat adat yang terbelakang, kaum muda pencari kerja, kaum cacat dan kelompok wanita yang didiskriminasikan/dikesampingkan.
- b. Memberdayakan kelompok-kelompok masyarakat tersebut secara sosial ekonomis sehingga mereka dapat lebih mandiri dan dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup mereka, namun sanggup berperaan serta dalam pengembangan masyarakat. Dari pendapat tersebut, maka pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu melepaskan diri dari perangkat kemiskinan dan keterbelakangan.

Ide utama pemberdayaan mengenai modal sosial dan kekuasaan. Kekuasaan seringkali dikaitkan dan dihubungkan dengan kemampuan individu untuk membuat individu melakukan apa yang diinginkan, terlepas dari keinginan dan minat mereka. Pada dasarnya, pemberdayaan diletakkan pada kekuatan tingkat individu dan sosial.¹² Pemberdayaan merujuk pada kemampuan orang, khususnya kelompok rentan dan lemah sehingga mereka memiliki kekuatan atau kemampuan dalam (a) memenuhi kebutuhan dasarnya sehingga mereka memiliki kebebasan (*freedom*),

¹¹ Sumaryadi, I Nyoman. 2005. Perencanaan Pembangunan Daerah Otonom dan Pemberdayaan Masyarakat. Jakarta: CV. Citra Utama.

¹² Sipahelut, Michel. 2010. Analisa Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halmahera Utara. Tesis. IPB. Bogor.

dalam arti bukan saja bebas dalam mengemukakan pendapat, melainkan bebas dari kelaparan, bebas dari kebodohan, bebas dari kesakitan; (b) menjangkau sumber-sumber produktif yang memungkinkan mereka dapat meningkatkan pendapatannya dan memperoleh barang dan jasa-jasa yang mereka perlukan; dan (c) berpartisipasi dalam proses pembangunan dan keputusan-keputusan yang mempengaruhi mereka.¹³

Jimu¹⁴ menyatakan bahwa pembangunan masyarakat tidak hanya sebatas teori tentang bagaimana mengembangkan daerah pedesaan tetapi memiliki arti yang kemungkinan perkembangan di tingkat masyarakat. Pembangunan masyarakat seharusnya mencerminkan tindakan masyarakat dan kesadaran atas identitas diri. Komitmen untuk pengembangan masyarakat harus mengenali keterkaitan antara individu dan masyarakat dimana mereka berada. Masyarakat adalah sebuah fenomena struktural dan bahwa sifat struktural dari kelompok atau masyarakat memiliki efek pada cara orang bertindak, merasa dan berpikir. Tapi ketika kita melihat struktur tersebut, mereka jelas tidak seperti kualitas fisik dari dunia luar. Mereka bergantung pada keteraturan reproduksi sosial, masyarakat yang hanya memiliki efek pada orang-orang sejauh struktur diproduksi dan direproduksi dalam apa yang orang lakukan. Oleh karena itu, pengembangan masyarakat memiliki epistemologis logis dan yang dasar dalam kewajiban sosial yang individu memiliki terhadap masyarakat yang mengembangkan bakat mereka.

¹³ Suharto E. 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Kajian Strategi Pembangunan Kesejahteraan Sosial dan Pekerjaan Sosial. Bandung: PT Refika Aditama.

¹⁴ Jimu, M.I. 2008. Community Development. Community Development: A Cross-Examination of Theory and Practice Using Experiences in Rural Malawi. Africa Development. Vol XXXIII No 2. 2008. pp 23-35.

Adedokun, et al.¹⁵, menunjukkan bahwa komunikasi yang efektif akan menimbulkan partisipasi aktif dari anggota masyarakat dalam pengembangan masyarakat. Ia juga mengungkapkan bahwa ketika kelompok masyarakat yang terlibat dalam strategi komunikasi, membantu mereka mengambil kepemilikan inisiatif pembangunan masyarakat dari pada melihat diri mereka sebagai penerima manfaat pembangunan. Berdasarkan temuan tersebut, direkomendasikan bahwa para pemimpin masyarakat serta agen pengembangan masyarakat harus terlibat dalam komunikasi yang jelas sehingga dapat meminta partisipasi anggota masyarakat dalam isu-isu pembangunannya.

Jimu¹⁶ menunjukkan bahwa pengembangan masyarakat tidak khususnya masalah ekonomi, teknis atau infrastruktur. Ini adalah masalah pencocokan dukungan eksternal yang ditawarkan oleh agen pembangunan pedesaan dengan karakteristik internal sistem pedesaan itu sendiri, Oleh karena itu menurut Passmore (1972) dalam Jimu (2008), peran pemerintah pusat dan agen luar lainnya harus menginspirasi inisiatif lokal bahwa hal itu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam prakteknya, *top-down* perencanaan dan pelaksanaan proyek-proyek pembangunan harus memberi jalan kepada *bottom-up* atau partisipasi aktif masyarakat untuk mencapai apa yang disebut “pembangunan melalui negosiasi”. Hal ini sesuai menurut Talcot Parsons¹⁷, *power* merupakan sirkulasi dalam

¹⁵ Adedokun, O.M. C.W., Adeyamo dan E.O. Olorunsula. 2010. The Impact of Communication on Community Development. J Communication. 1(2): 101-105.

¹⁶ Jimu, M.I. 2008. Community Development. Community Development: A Cross-Examination of Theory and Practice Using Experiences in Rural Malawi. Africa Development. Vol XXXIII No 2. 2008. pp 23-35.

¹⁷ Prijono, Onny S. dan A.M.W. Pranarka. 1996. Pemberdayaan Konsep Kebijakan dan Implementasinya. Jakarta: CSIS

subsistem suatu masyarakat, sedangkan *power* dalam *empowerment* adalah daya sehingga *empowerment* dimaksudkan sebagai kekuatan yang berasal dari bawah (*Botom-Up*).

Shucksmith¹⁸ menyatakan pendekatan *bottom-up* untuk pembangunan pedesaan berdasarkan pada asumsi bahwa sumber daya daerah – alam, manusia dan budaya – memegang kunci untuk perkembangannya. Sedangkan pembangunan pedesaan *top-down* melihat tantangan utamanya sebagai mengatasi perbedaan pedesaan dan kekhasan melalui promosi keterampilan teknis universal dan modernisasi infrastruktur fisik, bawah ke atas pengembangan melihat tantangan utama sebagai memanfaatkan selisih melalui memelihara khas lokal kapasitas manusia dan lingkungan itu. Model *bottom-up* terutama menyangkut mobilisasi sumber daya lokal dan aset. Artinya, masyarakat pembangunan harus dianggap bukan sebagai teori pembangunan, tetapi praktek pembangunan yang menekankan emansipasi dari lembaga yang tidak pantas dan setiap melemahkan situasi yang mengarah pada perias partisipasi, pengembangan masyarakat harus menjadi mekanisme untuk menarik kekuatan kolektif anggota masyarakat tertentu – yang terdiri dari laki-laki dan perempuan, kaya dan miskin, mampu dan cacat, dll – untuk mengubah di wilayah mereka.

Pemberdayaan ini memiliki tujuan dari dua arah, yaitu melepaskan belenggu kemiskinan dan keterbelakangan dan memperkuat posisi lapisan masyarakat dalam struktur kekuasaan. Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses,

¹⁸ Shucksmith, Mark. 2013. *Future Direction in Rural Development*. England: Carnegie UK Trust.

pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan merujuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki keluasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya.¹⁹

Konsep pemberdayaan menurut Friedman²⁰ dalam hal ini pembangunan alternatif menekankan keutamaan politik melalui otonomi pengambilan keputusan untuk melindungi kepentingan rakyat yang berlandaskan pada sumber daya pribadi, langsung melalui partisipasi, demokrasi dan pembelajaran sosial melalui sebuah pengamatan langsung. Menurut Chambers²¹ pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru pembangunan, yakni yang bersifat “*people centered, participatory, empowering, dan sustainable*”.

Jika dilihat dari proses operasionalisainya, maka ide pemberdayaan memiliki dua kecenderungan, antara lain: pertama, kecenderungan primer, yaitu kecenderungan proses yang memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan,

¹⁹ Sipahelut, Michel. 2010. Analisa Pemberdayaan Masyarakat Nelayan di Kecamatan Tobelo Kabupaten Halahera Utara. Tesis. IPB. Bogor.

²⁰ Friedman, John. 1992. Empowerment The Politics of Alternative Development. Cambridge, USA: Blackwell Publisher.

²¹ Chambers, R. 1985. Rural Development: Putting The Last First. London: New York.

kekuatan, atau kemampuan (*power*) kepada masyarakat atau individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun aset material guna mendukung pembangunan kemandirian mereka melalui organisasi; dan kedua, kecenderungan sekunder yaitu kecenderungan yang menekankan pada proses memberikan stimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Konsep pemberdayaan menekankan bahwa orang memperoleh keterampilan, pengetahuan, dan kekuasaan yang cukup untuk mempengaruhi kehidupannya dan kehidupan orang lain yang menjadi perhatiannya²². Pemahaman mengenai konsep pemberdayaan tidak bisa dilepaskan dari pemahaman mengenai siklus pemberdayaan itu sendiri, karena pada hakikatnya pemberdayaan adalah sebuah usaha berkesinambungan untuk menempatkan masyarakat menjadi lebih proaktif dalam menentukan arah kemajuan dalam komunitasnya sendiri. Artinya program pemberdayaan tidak bisa hanya dilakukan dalam satu siklus saja dan berhenti pada suatu tahapan tertentu, akan tetapi harus tetap berkesinambungan dan kualitasnya terus meningkat dari satu tahapan ke tahapan berikutnya²³.

Menurut Wilson²⁴ terdapat tujuh tahapan dalam siklus pemberdayaan masyarakat. Tahap pertama yaitu keinginan dari masyarakat itu sendiri untuk

²² Sukmaniar. 2007. Efektivitas Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) Pasca Tsunami di Kecamatan Lhoknga Kabupaten Aceh Besar. Tesis. UNDIP. Semarang.

²³ Mubarak, Z. 2010. Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Ditinjau dari Proses Pengembangan Kapasitas pada Program PNPM Mandiri Perkotaan di Desa Sastrodirjan Kabupaten Pekalongan. Tesis. Program Studi Magister Teknik Pemberdayaan Wilayah dan Kota. UNDIP. Semarang.

²⁴ Wislon, Terry. 1996. *The Empowerment Manual*. London: Grower Publishing Company.

berubah menjadi lebih baik. Pada tahap kedua, masyarakat diharapkan mampu melepaskan halangan-halangan atau faktor-faktor yang bersifat resistensi terhadap kemajuan dalam dirinya dan komunitasnya. Pada tahap ketiga, masyarakat diharapkan sudah menerima kebebasan dan merasa memiliki tanggung jawab dalam mengembangkan dirinya dan komunitasnya. Tahap keempat yaitu upaya untuk mengembangkan peran dan batas tanggung jawab yang lebih luas, hal ini juga terkait dengan minat dan motivasi untuk melakukan pekerjaan dengan baik. Pada tahap kelima ini hasil-hasil nyata dari pemberdayaan mulai kelihatan, dimana peningkatan rasa memiliki yang lebih besar menghasilkan keluaran kinerja yang lebih baik. Pada tahap keenam telah terjadi perubahan perilaku dan kesan terhadap dirinya, dimana keberhasilan dalam peningkatan kinerja mampu meningkatkan perasaan psikologis di atas posisi sebelumnya. Pada tahap ketujuh, masyarakat yang telah berhasil dalam memberdayakan dirinya, merasa tertantang untuk upaya yang lebih besar guna mendapatkan hasil yang lebih baik. Siklus pemberdayaan ini menggambarkan proses mengenai upaya individu dan komunitas untuk mengikuti perjalanan ke arah prestasi dan kepuasan individu dan pekerjaan yang lebih tinggi.

Apabila kita cermati dari serangkaian literatur tentang konsep-konsep pemberdayaan masyarakat, maka konsep pemberdayaan masyarakat adalah suatu proses yang diupayakan untuk melakukan perubahan. Pemberdayaan masyarakat memiliki makna memberi kekuatan/daya kepada kumpulan masyarakat yang berada pada kondisi ketidakberdayaan agar menjadi berdaya dan mandiri serta memiliki kekuatan melalui proses dan tahapan yang sinergis.

1.4.3 Teori Modal Sosial

Modal sosial sebagai sumber daya sosial dipandang sebagai investasi untuk mendapatkan sumber daya baru dalam masyarakat. Oleh karena itu modal sosial diyakini sebagai salah satu komponen utama dalam menggerakkan kebersamaan, mobilitas ide, saling percaya dan saling menguntungkan untuk mencapai kemajuan bersama.

Modal sosial adalah kapabilitas yang muncul dari kepercayaan umum di dalam sebuah masyarakat atau bagian-bagian tertentu dari masyarakat tersebut. Selain itu, konsep ini juga diartikan sebagai serangkaian nilai atau norma informal yang dimiliki bersama di antara para anggota suatu kelompok yang memungkinkan terjalinnya kerjasama. Sedangkan Fukuyama²⁵ menyatakan bahwa modal sosial memegang peranan yang sangat penting dalam memfungsikan dan memperkuat kehidupan masyarakat modern. Modal sosial merupakan syarat yang harus dipenuhi bagi pembangunan manusia, pembangunan ekonomi, sosial, politik dan stabilitas demokrasi. Berbagai permasalahan dan penyimpangan yang terjadi di berbagai negara adalah rendahnya modal sosial yang tumbuh di tengah masyarakat. Modal sosial yang lemah akan menghilangkan semangat gotong royong, memperparah kemiskinan, dan menghalangi upaya untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Coleman²⁶ mendefinisikan modal sosial sebagai “sumber penting bagi para individu dan dapat sangat mempengaruhi kemampuan mereka untuk bertindak dan kualitas kehidupan yang mereka rasakan. Coleman juga menggambarkan bahwa

²⁵ Fukuyama, Francis. 1995. *The End of History and The Last Man*. NY: Free Press.

²⁶ Coleman, James S. 2009. *Dasar-Dasar Teori (Foundations of Social Theory)*. Nusa Media.

modal sosial memudahkan pencapaian tujuan yang tidak dapat dicapai tanpa keberadaannya atau dapat dicapai hanya dengan kerugian yang lebih tinggi". Menurut Coleman, modal sosial tercipta ketika relasi antara orang-orang mengalami perubahan sesuai dengan cara-cara yang memudahkan tindakan. Modal sosial tidak berwujud, sama seperti modal manusia. Keterampilan dan pengetahuan yang ditunjukkan oleh seseorang atau sekelompok orang merupakan perwujudan modal manusia. Demikian pula halnya modal sosial karena diwujudkan dalam relasi di antara orang-orang.

Burk dalam Agus Supriono dkk²⁷ mendefinisikan modal sosial sebagai kemampuan masyarakat untuk melakukan asosiasi (berhubungan) satu sama lain dan selanjutnya menjadi kekuatan yang sangat penting, bukan hanya bagi kekuatan ekonomi tetapi juga pada setiap aspek eksistensi sosial yang lain. Definisi modal sosial menurut Cox dalam Agus Supriono dkk adalah suatu rangkaian proses hubungan antar manusia yang ditopang oleh jaringan, norma-norma dan kepercayaan sosial yang memungkinkan efisiensi dan efektifnya koordinasi dan kerja sama untuk keuntungan dan kebajikan bersama.

Menurut Hasbullah²⁸, modal sosial memiliki enam unsur, yaitu:

a. Participation in a network

Kemampuan sekelompok orang untuk melibatkan diri dalam suatu jaringan hubungan sosial, melalui berbagai variasi hubungan yang saling

²⁷ Supriono, Agus. 2009. Cooperative Learning Teori dan Aplikasi Paikem. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

²⁸ Hasbullah, Jousari. 2006. Social Capital (Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia). Jakarta: MR United Press.

berdampingan dan dilakukan atas dasar prinsip kesukarelaan (*vountary*), kesamaan (*equality*), kebebasan (*freedom*), dan keadaban (*civility*). Kemampuan anggota kelompok atau anggota masyarakat untuk selalu menyatukan diri dalam suatu pola hubungan yang sinergis akan sangat besar pengaruhnya dalam menentukan kuat tidaknya modal sosial suatu kelompok.

b. Reciprocity

Kecenderungan saling tukar kebaikan antara individu dalam suatu kelompok atau antar kelompok itu sendiri. Pola pertukaran terjadi dalam suatu kombinasi jangka panjang dan jangka pendek dengan nuansa altruisme tanpa mengharapkan imbalan. Pada masyarakat dan kelompok-kelompok sosial yang terbentuk yang memiliki bobot resiprositas kuat akan melahirkan suatu masyarakat yang memiliki tingkat modal sosial yang tinggi.

c. Trust

Suatu bentuk keinginan untuk mengambil resiko dalam hubungan-hubungan sosialnya yang didasari oleh perasaan yakin bahwa yang lain akan melakukan sesuatu seperti yang diharapkan dan akan senantiasa bertindak dalam suatu pola tindakan yang saling mendukung. Paling tidak, yang lain tidak akan bertindak merugikan diri dan kelompoknya. Tindakan kolektif yang didasari saling percaya akan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berbagai bentuk dan dimensi terutama dalam konteks kemajuan bersama.

d. Social norms

Sekumpulan aturan yang diharapkan dipatuhi dan diikuti oleh masyarakat dalam suatu entitas sosial tertentu. Aturan-aturan ini biasanya terinstitusionalisasi, tidak tertulis tapi dipahami sebagai penentu pola tingkah laku yang baik dalam konteks hubungan sosial sehingga ada sanksi sosial yang diberikan jika melanggar. Norma sosial akan menentukan kuatnya hubungan antar individu karena merangsang kohesifitas sosial yang berdampak positif bagi perkembangan masyarakat.

e. Values

Sesuatu ide yang telah turun temurun dianggap benar dan penting oleh anggota kelompok masyarakat. Nilai merupakan hal yang penting dalam kebudayaan, biasanya ia tumbuh dan berkembang dalam mendominasi kehidupan kelompok masyarakat yang pada akhirnya membentuk pola kultural.

f. Proactive action

Keinginan yang kuat dari anggota kelompok untuk tidak saja berpartisipasi tetapi senantiasa mencari jalan bagi keterlibatan anggota kelompok dalam suatu kegiatan masyarakat. Anggota kelompok melibatkan diri dan mencari kesempatan yang dapat memperkaya hubungan-hubungan sosial dan menguntungkan kelompok. Perilaku inisiatif dalam mencari informasi berbagai pengalaman, memperkaya ide, pengetahuan, dan beragam bentuk inisiatif lainnya baik oleh individu maupun kelompok, merupakan wujud modal sosial yang berguna dalam membangun masyarakat.

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Desain Penelitian

Penelitian ilmiah memerlukan metode penelitian. Menetapkan metode penelitian berfungsi untuk menganalisis atau menguji ada tidaknya hubungan antara variabel sebagaimana dikemukakan dalam permasalahan penelitian.²⁹ Desain penelitian kualitatif dipilih dalam penelitian ini. Metode kualitatif menghasilkan data deskriptif mengenai kata-kata lisan maupun tertulis dan tingkah laku yang dapat diamati dari orang-orang yang diteliti. Hal ini dikarenakan peneliti ingin mengetahui secara lebih mendalam mengenai pemberdayaan masyarakat dalam program desa wisata yang ada di lapangan. Tipe kualitatif adalah tipe penelitian yang bertujuan untuk menganalisis fenomena atau kasus yang berkaitan dengan fokus penelitian yang akan dilakukan secara lebih mendalam.

1.5.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian menurut Iskandar³⁰ adalah situasi dan kondisi lingkungan tempat yang berkaitan dengan masalah penelitian. Moleong³¹ menyatakan bahwa dalam penentuan lokasi penelitian cara terbaik yang ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substansif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada di lapangan, sementara itu keterbatasan

²⁹ Suyanto, Bagong dan Utinah (ed.). 2004. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.

³⁰ Iskandar. 2008. *Metodologi Penelitian Pendidikan dan Sosial (Kuantitatif dan Kualitatif)*. Jakarta: GP Press.

³¹ Moleong, Lexy J. 2008. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

geografis dan praktis seperti waktu, biaya dan tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian. Lokasi penelitian yakni Desa Cempaka Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.

1.5.3 Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif dengan memberikan gambaran masalah secara sistematis, cermat, rinci dan mendalam. Penelitian kualitatif merupakan data yang dapat mencakup hampir semua data non-numerik. Data ini dapat menggunakan kata-kata untuk menggambarkan fakta dan fenomena yang diamati. Penelitian ini terbatas pada usaha mengungkapkan fakta suatu masalah atau peristiwa. Hasil penelitian ditekankan pada memberikan gambaran secara objektif tentang keadaan sebenarnya dari objek yang diselidiki yaitu keadaan pemberdayaan Desa Cempaka.

1.5.4 Sumber Data

Penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu:

1. Data Primer

Data Primer adalah informasi atau fakta yang bersumber langsung dari informan yang diteliti. Data primer adalah data yang diperoleh dari narasumber.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah informasi atau fakta yang bersumber dari berbagai dokumen, buku-buku, laporan, artikel dan sebagainya.

1.5.5 Informan Data

Dalam penelitian ini akan menggunakan model pengambilan sampel secara bertujuan (*purposive sampling*). *Purposive sampling* merupakan sampel yang dipilih cermat dianggap layak atau representatif dalam memberikan informasi mengenai permasalahan penelitian.³² Informan yang dipilih dalam penelitian pemberdayaan masyarakat melalui program desa wisata dalam penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tegal adalah:

- a. Kepala Desa Cempaka Abdul Khayyi
- b. Sekretaris Desa Cempaka Unul Albab
- c. Ketua Pokdarwis Ikhsannudin
- d. Penanggung Jawab Pasar Slumpring Dayat
- e. Pedagang Pasar Slumpring Yatun, Tukyadi, Habib, dan Umyati

1.5.6 Teknik Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data merupakan alat yang digunakan untuk mengumpulkan data. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan tiga macam teknik utama, yakni:

³² Nasution, S. 2009. Metode Penelitian. Jakarta: Bumi Aksara.

1. Wawancara

Wawancara merupakan pertemuan dua orang atau bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Jenis-jenis teknik wawancara adalah sebagai berikut³³:

- a. Wawancara terpimpin (terstruktur). Tanya jawab terarah dan terfokus untuk mengumpulkan data-data yang relevan saja. Biasanya menggunakan pedoman wawancara yang memuat hal-hal yang akan ditanyakan secara terinci, sehubungan dengan pengumpulan informasi tentang topik penelitiannya.
- b. Wawancara tak terpimpin (tidak terstruktur). Wawancara yang tidak terarah. Peneliti hanya menentukan topik dan tujuan yang ingin dicapai dari diadakannya wawancara. Kelemahannya adalah tidak efisien waktu, biaya, dan tenaga. Keuntungannya cocok untuk penelitian pendahuluan, tidak memerlukan keterampilan bertanya dan dapat memelihara kewajaan suasana.

Jenis wawancara yang digunakan merupakan wawancara semi terstruktur dimana peneliti mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara bebas dan leluasa, tanpa terikat oleh suatu susunan pertanyaan yang telah dipersiapkan sebelumnya. Pertanyaan yang diajukan sesuai daftar yang fleksibel atau sebuah pedoman. Dengan wawancara akan mengetahui hal-hal yang lebih mendalam tentang partisipan dalam menginterpretasikan situasi dan fenomena yang terjadi. Wawancara penting dilakukan karena akan mampu menyediakan hasil pengetahuan yang mendalam dari objek-objek penelitian yang diteliti.

³³ Susanto. 2006. Metode Penelitian Sosial. Surakarta: UNS Pres.

2. Observasi

Pengamatan (observasi) menurut Sutrisno Hadi dalam Andi Prastowo³⁴ merupakan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap suatu gejala yang tampak pada objek penelitian.

Observasi dalam hal ini dilakukan untuk mengetahui aktivitas, keadaan, dan pelaksanaan program desa wisata serta mencatat apa yang terjadi pada masyarakat Desa Cempaka Kecamatan Bumijawa Kabupaten Tegal.

3. Dokumentasi

Dokumentasi menurut Sugiyono³⁵ adalah catatan peristiwa yang sudah berlalu. Sedangkan menurut Guba dan Lincoln dalam Moloeng³⁶, dokumentasi adalah setiap bahan tertulis ataupun film, dokumentasi sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan bahkan meramalkan.

1.5.7 Analisis Data

Analisis data menurut Patton adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar.³⁷ Dalam tahap analisis data ini, data yang diperoleh dari hasil wawancara dan observasi akan

³⁴ Prastowo, Andi. 2012. Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian. Yogyakarta: Ar-ruzz Media.

³⁵ Sugiyono. 2013. Metode Penelitian Pendidikan. Bandung: Alfabeta.

³⁶ Moloeng, Lexy J. 2008. Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

³⁷ M.Q. Patton. 1980. Qualitative Evaluation Method. Beverly Hills, CA: Sage Publication.

dikelompokkan sesuai pola dan kategori-kategori tertentu sesuai dengan pokok-pokok permasalahan yang ada dalam perumusan masalah, kemudian dianalisis untuk menemukan jawaban dan kesimpulan dari penelitian tersebut. Analisis data yang digunakan dalam penelitian adalah analisis yang bersifat kualitatif. Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi suatu yang dapat dikelola, mensistenskannya, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari dan memutuskan apa yang diceritakan kepada orang lain³⁸. Analisis data ini terdiri dari:

1. Reduksi data

Reduksi data yaitu suatu proses pemilihan, pemusatan perhatian kepada penyerderhanaan, pengabstrakan dan transformasi data yang telah diperoleh. Data yang berasal dari hasil wawancara dan observasi akan dibuat rangkuman dimana jawaban dari sumber atau objek yang diwawancarai tetap utuh sehingga adanya keobjektifan. Data-data yang telah direduksi ini memberikan gambaran yang tajam mengenai hasil dari pengamatan dan mempermudah peneliti jika itu tajam mengenai hasil dari pengamatan dan mempermudah peneliti jika itu diperlukan. Dalam mengolah hasil sementara menjadi teori substansif, penafsiran data merupakan tahap akhir serta mengambil kesimpulan dari data-data yang sudah dikumpulkan, dianalisis untuk mendapatkan makna dari pokok kajian.

2. Penyajian data

³⁸ Moloeng, Lexy J. 2008. Metodologi Peneitian Kualitatif. Bandung: PT Remaja Rosadakarya.

Kumpulan informasi yang tersusun memberikan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian hasil analisis data pada penelitian ini adalah deskripsi. Deskripsi adalah menyajikan hasil analisis data dengan cara menjelaskan dan menguraikan atau mendeskripsikan objek penelitian. Penyajian data ini dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk tertentu. Teknik analisis data yang digunakan adalah:

a. Koding

Pemberian kode secara konsisten untuk fenomena yang sama pada saat menganalisis wawancara atau catatan lapangan. Koding ini memudahkan peneliti dalam beberapa hal memudahkan identifikasi fenomena, frekuensi kode menunjukkan kecenderungan temuan dan membantu penyusunan kategori. Menurut Mc Millan dan Schumacher³⁹, seseorang peneliti ketika melakukan pengkodean menggunakan salah satu sistem pengklasifikasian sebagai berikut:

1. Membagi-bagikan data pada muatan unit-unit yang disebut topik dan mengelompokkan topik-topik ke dalam kumpulan data yang lebih besar untuk membentuk kategori; atau
2. Memulai dengan kategori-kategori yang ditentukan sebelumnya lalu memecah kategori menjadi subkategori yang lebih kecil; atau
3. Mengkombinasikan strategi-strategi dengan menggunakan beberapa kategori yang ditentukan sebelumnya dan menambah kategori-kategori yang baru ditemukan.

³⁹ Mc Millan, J.H. dan Schumacher, S. 2001. *Research in Education*. New York: Longman, Inc.

b. Kategorisasi

Kategorisasi berarti penyusunan kategori. Kategori tidak lain adalah salah satu tumpukan yang disusun atas dasar pikiran, intuisi, pendapat, atau kriteria tertentu.

c. Penafsiran data

Tujuan yang akan dicapai dalam penafsiran data adalah salah satu diantaranya beberapa tujuan, yaitu teori substantif. Penafsiran data dalam penelitian ini memiliki tujuan akhir yaitu untuk mempermudah teori substantif yang mungkin diperoleh dari pengumpulan data di lapangan. Dalam mengelola hasil sementara menjadi teori substantif, penafsiran data merupakan tahap akhir serta mengambil kesimpulan dari data-data yang sudah dikumpulkan, dianalisa untuk mendapatkan makna dari pokok kajian.

d. Penarikan kesimpulan

Dalam awal pengumpulan data peneliti sudah mulah mengerti hal yang diteliti, sehingga memudahkan dalam pengambilan kesimpulan yang longgar tetap terbuka tetapi kemudian menjadi rinci dan mengakar. Jadi berdasarkan data-data yang diperoleh peneliti mencoba mengambil kesimpulan. Penarikan kesimpulan ini tergantung pada besarnya kumpulan data tersebut.